

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban Assesor	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
A. PENGUNGKIT		60,00				18,33				
I. PENSIUNIHAN		20,00				6,00				
1. MANAJEMEN PERUBAHAN		2,00				0,40				
i. Tim Reformasi Birokrasi		0,40								
	a.	Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk	a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi	A/B/C	A	1,00		Setjen Wantannas telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 27 Tahun 2022	1. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Dokumentasi pembentukan Tim RB (Usulan pembentukan tim/Nodin)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
	b.	Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja	a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja	A/B/C/D	A	1,00	Tim Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas telah melaksanakan seluruh tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan	1. Penetapan Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Roadmap RB Tahun 2020 - 2024; 2. Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 tahun 2021 Tentang Aksi Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas Tahun 2021 dan tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2020; 3. Laporan pelaksanaan RB triwulanan 4. Laporan Tindak Lanjut atas monev RB semesteran	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
	c.	Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Belum ada rencana kerja yang dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	A	1,00	Tim Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	1. Laporan Monev RB Triwulanan 2. Laporan pelaksanaan RB semesteran/tahunan 3. Laporan Tindak Lanjut atas monev RB semesteran/tahunan	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
ii. Road Map Reformasi Birokrasi		0,40				0,40				
	a.	Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan diformalkan	Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/Tidak	Ya	1,00	Road Map Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas Tahun 2020 - 2024 telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	1. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 68 tahun 2020 Tentang Roadmap RB Setjen Wantannas Tahun 2020 - 2024 2. Dokumentasi Penyusunan Road Map RB Setjen Wantannas (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
	b.	Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup 8 area perubahan yang terintegrasi	a. Road Map Reformasi Birokrasi terdiri atas 8 area perubahan yang terintegrasi b. Road Map Reformasi Birokrasi terdiri atas 8 area perubahan namun belum terintegrasi c. Road Map Reformasi Birokrasi Tidak mencakup 8 area perubahan	A/B/C	A	1,00	Road Map Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas Tahun 2020 - 2024 terdiri atas 8 area perubahan yang terintegrasi	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 68 tahun 2020 Tentang Roadmap RB Setjen Wantannas Tahun 2020 - 2024	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
	c.	Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup "quick win"	a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat c. Belum ada quick win	A/B/C	A	1,00	Quick win sudah ada sebagaimana tertuang dalam Roadmap RB Setjen Wantannas Tahun 2020 - 2024, sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat sebagaimana tertuang dalam laporan pelaksanaan quick win	1. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 68 tahun 2020 Tentang Roadmap RB Setjen Wantannas Tahun 2020 - 2024 2. Laporan Quick Win 3. Laporan Quick Win tentang kebijakan percepatan vaksinasi covid-19 di Indonesia dengan lokasi Provinsi Jawa Barat tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
	d.	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi telah melibatkan seluruh unit organisasi	a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	A	1,00	Seluruh unit kerja Setjen Wantannas telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi baik sebagai tim penyusunan, rapat koordinasi, maupun sosialisasi	1. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 68 tahun 2020 Tentang Roadmap RB Setjen Wantannas Tahun 2020 - 2024 2. Dokumentasi Penyusunan Road Map RB Setjen Wantannas (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
	e.	Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi kepada anggota organisasi	a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	A	1,00	Seluruh anggota organisasi secara berkala telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 68 tahun 2020 Tentang Roadmap RB Setjen Wantannas Tahun 2020 - 2024 2. Dokumentasi Sosialisasi Road Map RB Setjen Wantannas (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi		0,80				0,80				
	a.	PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	A/B/C/D	A	1,00	Seluruh PMPRB telah direncanakan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 tahun 2021 dan diorganisasikan dengan baik	1. Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 tahun 2021 Tentang Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Dokumentasi Penyusunan Rencana Aksi RB Setjen Wantannas (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
	b.	Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja	a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi d. Aktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi	A/B/C/D	A	1,00	Seluruh kegiatan PMPRB telah disosialisasikan	1. Dokumentasi rapat koordinasi penyusunan LKE PMPRB (Nodin, Foto, dan Notulen) 2. Laporan Monev RB Triwulanan 3. Laporan pelaksanaan RB triwulanan 4. Laporan Tindak Lanjut atas monev RB semesteran	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
	c.	Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB	a. Seluruh Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan b. Sebagian besar Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan c. Sebagian kecil Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan d. Tim Asesor PMPRB belum mendapatkan pelatihan	A/B/C/D	A	1,00	Dilaksanakan pelatihan untuk Tim Asesor PMPRB secara berkala	1. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Dokumentasi pelatihan tim asesor PMPRB (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	

				d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor	A/B/C/D		Bim Disisi	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan Peraturan MenPANRB nomor 26 tahun 2020	1. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Dokumentasi penunjukkan tim asesor PMPRB (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				e. Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi	a. Koordinator asesor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi b. Koordinator asesor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi c. Koordinator asesor belum melakukan reviu kertas kerja	A/B/C	A	1,00	Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi	1. LKE PMPRB Setjen Wantannas 2. Dokumentasi kegiatan pengisian dan reviu LKE PMPRB (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				f. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi	a. Mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator asesor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas c. Para asesor belum menetapkan nilai PMPRB instansi dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas	A/B/C	A	1,00	Seluruh asesor mencapai kesepakatan atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi	1. LKE PMPRB Setjen Wantannas 2. Dokumentasi kegiatan pengisian dan reviu LKE PMPRB (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A/B/C	A	1,00	Disosialisasikan dan dilaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	1. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 68 tahun 2020 Tentang Roadmap RB Setjen Wantannas Tahun 2020-2024 2. Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			iv.	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	0,40			0,40			
				a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Belum ada dalam jajaran pimpinan tertinggi yang terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	A	1,00	Seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	1. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Laporan Monev RB Triwulanan 3. Laporan pelaksanaan RB triwulanan 4. Laporan Tindak Lanjut atas monev RB semesteran 5. Dokumentasi kegiatan RB (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai lingkatan tertentu e. Belum ada media komunikasi untuk menyosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi	A/B/C/D/E	A	1,00	Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala	1. Website www.wantannas.go.id 2. Google Drive Tim Pelaksana RB 3. Whatsapp Group Kedinasan Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>	a. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja b. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja c. Sudah terdapat upaya pembentukan <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i>	A/B/C/D	A	1,00	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/ unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>	1. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Rencana Kerja Agen Perubahan Setjen Wantannas 3. Laporan Monev rencana kerja Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 4. Dokumentasi kegiatan Agen Perubahan (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			2	DEREGULASI KEBUJUKAN	2,00			2,00			
			i.	Harmonisasi	1,00			1,00			
				a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat	A/B/C	A	1,00	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat, sehingga terdapat data dan dasar untuk melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/tidak sesuai kebutuhan organisasi	1. Laporan evaluasi penguatan perundang-undangan Setjen Wantannas Semester II Tahun 2021. 2. Kepsesjen nomor 12 tahun 2022 tentang Program pembentukan Persetjen Wantannas tahun 2022 3. Kepsesjen nomor 46 tahun 2021 tentang Program pembentukan Persetjen Wantannas tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	A/B/C	A	1,00	telah dilakukan revisi perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, sehingga telah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum yang ada	1. Kepsesjen nomor 12 Tahun 2022 ttg Progtuk Tahun 2022. 2. Dokumentasi Penyusunan Persetjen Baru adalah Persetjen no 5 tahun 2021 tentang PAGN, Persetjen No 6 Tahun 2021 tentang Renja, Persetjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis 3. Dokumentasi Penyusunan Persetjen yang mencakup Persetjen lama adalah Persetjen No 4 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas, Persetjen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Piagam Audit Intern, Persetjen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Tulis Produk	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			ii.	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan	1,00			1,00			
				a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/Kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi	a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut	A/B/C/D	A	1,00	Sudah terdapat sistem pengendalian penyusunan peraturan yang memuat persyaratan adanya rapat koordinasi, naskah konsep dan paraf koordinasi, yang ditetapkan melalui program setiap tahun sehingga memenuhi ketentuan undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan	1. Persetjen No. 88 Tahun 2020 ttg Pembentukan Persetjen. 2. Kepsesjen Wantannas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Program Pembentukan Persetjen Wantannas Tahun 2022	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	A/B/C	A	1,00	telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala dan sistem masih berjalan efektif	1. Laporan evaluasi penguatan perundang-undangan Setjen Wantannas Semester II Tahun 2021 2. Dokumentasi evaluasi (wabku penyusunan laporan monev akhir tahun)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

3 PENATAAN DAN Penguatan Organisasi			3,00			2,80			
i. Penataan Organisasi			1,00			0,80			
	a.	Telah disusun desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis	a. Telah disusun desain organisasi yang seluruh unit organisasinya sesuai dengan rencana strategis b. Telah disusun desain organisasi yang sebagian unit organisasinya sesuai dengan rencana strategis c. Desain organisasi belum disusun	A/B/C	A	1,00	desain organisasi yang ada telah sesuai dengan rencana strategis Setjen Wantannas yang tertuang dalam Persejten Wantannas No 80 Tahun 2020 tentang SOTK	1. surat Sejesen Wantannas kepada Menteri PANRB Nomor B-104/SW.01/KL.01.11/2020 perihal permohonan persetujuan SOTK, Evaluasi Jabatan, dan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional 2. Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Setjen Wantannas Tahun 2021 3. Surat Menteri PANRB kepada Setjen Wantannas Nomor B/344/M.SM.02.00/2020 perihal Persetujuan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Setjen Wantannas. 4. Keppesjen Wantannas Nomor 160 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan di Lingkungan Setjen Wantannas. 5. Persetujuan SOTK dari Menteri PANRB Nomor B/839/M.KT.01/2020 tanggal 9 Juli 2020. 6. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen Wantannas.	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortal.wantannas.go.id/sirebo
	b.	Telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi	a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai 2 tingkat organisasi (eselon) b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai 3 tingkat organisasi (eselon) c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai 4 atau 5 tingkat organisasi (eselon)	A/B/C	A	1,00	Setjen Wantannas mempunyai struktur organisasi 2 tingkat organisasi (eselon) dan terdapat 1 jabatan eselon 3 (Kabag PPBJ) serta 1 jabatan eselon 4 (Kasubag Protokol dan TU Pimpinan)	1. surat Sejesen Wantannas kepada Menteri PANRB Nomor B-104/SW.01/KL.01.11/2020 perihal permohonan persetujuan SOTK, Evaluasi Jabatan, dan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional. Dalam surat tersebut Setjen Wantannas telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jumlah kebutuhan SDM dari 513 pegawai menjadi 200 pegawai. 2. Surat Menteri PANRB kepada Setjen Wantannas Nomor B/344/M.SM.02.00/2020 perihal Persetujuan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortal.wantannas.go.id/sirebo
	c.	Telah dirumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan instansi.	a. Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional telah dirumuskan dengan jelas pada seluruh unit organisasi yang ditetapkan oleh pimpinan instansi b. Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional telah dirumuskan dengan jelas pada sebagian unit organisasi yang ditetapkan oleh pimpinan instansi c. Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional belum dirumuskan	A/B/C	A	1,00	Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional telah digambarkan melalui bagan struktur organisasi pada Persejten Wantannas no 9 tahun 2020 dan telah diperjelas pada Persejten Wantannas no 9 tahun 2021	1. Persejten Wantannas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Setjen Wantannas 2. Persejten Wantannas No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortal.wantannas.go.id/sirebo
	d.	Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan.	a. Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional pada seluruh unit kerja sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan b. Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional pada sebagian unit kerja sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan c. Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional belum dilakukan	A/B/C	B	0,50	Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional pada sebagian unit kerja diantaranya bagian Utama, Pengawasan Internal, Kepegawaian dan Hukum, Keuangan	1. surat Sejesen Wantannas kepada Menteri PANRB Nomor B-104/SW.01/KL.01.11/2020 perihal permohonan persetujuan SOTK, Evaluasi Jabatan, dan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional. Dalam surat tersebut Setjen Wantannas telah menyampaikan usulan penyetaraan jabatan eselon III sebanyak 9 orang dan eselon IV sebanyak 28 orang. 2. Surat Menteri PANRB kepada Setjen Wantannas Nomor B/344/M.SM.02.00/2020 perihal Persetujuan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Setjen Wantannas. 3. Keppesjen Wantannas Nomor 160 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan di Lingkungan Setjen Wantannas.	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortal.wantannas.go.id/sirebo
	e.	Telah disusun kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi	a. Seluruh unit organisasi telah mempunyai kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian unit organisasi telah mempunyai kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi c. Belum ada kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi	A/B/C	B	0,50	1. pada Orla terdapat 2 jabatan fungsional Analis Kebijakan 2. pada Pengawasan Internal terdapat 4 jabatan fungsional Auditor 3. pada Kepegawaian dan Hukum terdapat 4 jabatan fungsional Analis Kepegawaian 4. pada Keuangan terdapat 4 jabatan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan	1. surat Sejesen Wantannas kepada Menteri PANRB Nomor B-104/SW.01/KL.01.11/2020 perihal permohonan persetujuan SOTK, Evaluasi Jabatan, dan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional. Dalam surat tersebut Setjen Wantannas telah melakukan pengalihan jabatan fungsional yang disesuaikan dengan jabatan yang diibankan sesuai tugas dan fungsi organisasi. 2. Surat Menteri PANRB kepada Setjen Wantannas Nomor B/344/M.SM.02.00/2020 perihal Persetujuan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Setjen Wantannas. 3. Keppesjen Wantannas Nomor 160 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan di Lingkungan Setjen Wantannas. 4. Persetujuan SOTK dari Menteri PANRB Nomor B/839/M.KT.01/2020 tanggal 9 Juli 2020. 5. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen Wantannas.	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortal.wantannas.go.id/sirebo
	ii. Evaluasi Kelembagaan		1,00			1,00			
	a.	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organisasi	A/B/C	A	1,00	telah dilakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri dan mendapat nilai sebesar 68,74, kemudian, setelah diverifikasi atau divalidasi oleh MenPANRB mendapatkan nilai sebesar 77,40 yang masuk kategori peringkat komposit 4 yang artinya organisasi efektif.	1. Keppesjen Wantannas No. 151/2021 tentang Tim Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Setjen Wantannas 2. Laporan evaluasi kelembagaan pemerintah Setjen Wantannas tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortal.wantannas.go.id/sirebo

				a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1,00	Hasil evaluasi ditindaklanjuti dalam bentuk revitalisasi dan validasi Wantannas menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankannas) dan saat ini sudah diajukan izin prakarsa oleh Kemempnabr kepada Presiden.	1. Persetjen Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen Wantannas 2. Progres Revitalisasi dan Validasi Wantannas menjadi Wankannas Surat Menteri PANRB kepada Presiden Republik Indonesia Nomor B/1106/M.KT.01/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Penyampaian Kembali Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan pemyederhanaan birokrasi	a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan pemyederhanaan birokrasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan pemyederhanaan birokrasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan pemyederhanaan birokrasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1,00	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan pemyederhanaan birokrasi. Hal ini telah diajukan kepada Kemempnabr dan telah mendapat persetujuan dengan dialihkannya eselon 3 dan 4 ke jabatan fungsional.	Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Setjen Wantannas tanggal 30 Juni 2020	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				4 PENATAAN TATALAKSANA							
				i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)							
				a. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	A/B/C	A	1,00	peta proses bisnis telah disusun berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 19 tahun 2019 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah	Persetjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi	A/B/C	A	1,00	peta proses bisnis telah disusun sebagai upaya untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem	1. Persetjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Setjen Wantannas 2. Persetjen Nomor 80 Tahun 2020 tentang SOTK	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	A/B/C	A	1,00	peta proses bisnis disusun menyesuaikan rencana strategis Setjen Wantannas tahun 2020 - 2024 sebagai dokumen perencanaan yang memuatjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, dan target kinerja Setjen Wantannas	1. Persetjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Setjen Wantannas 2. Persetjen Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Renstra Setjen Wantannas 3. Persetjen Nomor 25 Tahun 2020 Tentang IKU	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang	a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja	A/B/C/D	A	1,00	peta proses bisnis disusun dengan memperhatikan tujuan organisasi dimana terdapat 3 proses yaitu proses utama, proses pendukung, dan proses manajemen	1. Persetjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Setjen Wantannas 2. Persetjen Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Renstra Setjen Wantannas 3. Persetjen Nomor 25 Tahun 2020 Tentang IKU	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	A/B/C/D	A	1,00	peta proses bisnis telah dijabarkan ke dalam SOP-AP sebanyak 43, terdiri dari 15 SOP Keleputan dan 28 SOP Kebioan, SOP Kebioan terdiri dari 14 SOP Biro Umum, 7 SOP Biro POK dan 7 SOP Biro PSP SOP Teknis terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) yang terbagi-bagi ke tiap unit kerja kebioan yang terdiri dari: 23 (dua puluh tiga) SOP Teknis di Biro Umum, 29 (dua puluh sembilan) SOP Teknis di Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan (POK) dan 26 (dua puluh enam) SOP Teknis di Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal (Biro PSP)	1. Persetjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Setjen Wantannas 2. Daftar SOP AP dan Teknis Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	A/B/C	C	0,00	Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	1. Persetjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Setjen Wantannas 2. Daftar SOP lintas fungsi (peta level n)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	A/B/C/D	A	1,00	telah dilakukan penerapan SOP Setjen Wantannas disetiap jenjang unit kerja yang disertai dengan monitoring pelaksanaannya secara berkala	1. Persetjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Setjen Wantannas 2. Laporan Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				h. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A/B/C/D	A	1,00	telah dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi dari penerapan peta proses bisnis dan SOP agar prosedur dan mekanisme kerja dapat berjalan dengan jelas dan terukur	1. Penataan Tata Laksana (business process) di lingkungan Setjen Wantannas 2021 2. Laporan Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	A/B/C	A	1,00	telah dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi dari penerapan peta proses bisnis dan SOP agar prosedur dan mekanisme kerja dapat berjalan dengan jelas dan terukur	1. Penataan Tata Laksana (business process) di lingkungan Setjen Wantannas 2021 2. Laporan Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)							

				a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Arsitektur SPBE	a. Kriteria huruf b terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil revidu dan evaluasi b. Kriteria huruf c terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan revidu dan evaluasi secara periodik c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE) d. Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia. (Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE hanya mencakup sebagian dari referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE)). e. Dokumen Arsitektur SPBE belum tersedia/masih dalam bentuk konsep	A/B/C/D/E	B	0,75	arsitektur SPBE Setjen Wantannas disusun dengan memperhatikan arsitektur SPBE nasional yang memuat domain-domain arsitektur SPBE yaitu: 1. domain arsitektur proses bisnis 2. domain arsitektur data dan informasi 3. domain arsitektur infrastruktur 4. domain arsitektur aplikasi 5. domain arsitektur keamanan 6. domain arsitektur layanan	1. arsitektur SPBE Setjen Wantannas 2. Persetjen Wantannas no 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan tatakelola SPBE di lingkungan Setjen Wantannas 3. laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Peta Rencana SPBE	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil revidu dan evaluasi b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu, dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan revidu dan evaluasi secara periodik c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK) d. Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia (Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK)) e. Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum tersedia/masih dalam bentuk konsep	A/B/C/D/E	B	0,75	peta rencana telah disusun dalam dokumen grand design siso karnnas 2020-2024 yang memuat tatakelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan audit teknologi dan informasi	1. Grand Design Siso Karnnas 2020 - 2024 2. Persetjen Wantannas no 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan tatakelola SPBE di lingkungan Setjen Wantannas 3. laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Tim Koordinasi SPBE Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan program kerjanya	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan hasil revidu dan evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti melalui perbaikan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan revidu dan evaluasi c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan seluruhnya (Kondisi: program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah) d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. (Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya) e. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terbentuk. (Kondisi: Tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan tanpa perencanaan)	A/B/C/D/E	B	0,75	tim koordinasi SPBE telah dibentuk berdasarkan Kepsesjen 82 tahun 2021 yang bertugas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Setjen Wantannas agar pelaksanaan terkoordinasi dengan baik dan selaras	1. Kepsesjen Wantannas Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tim koordinasi SPBE tahun 2021 2. Laporan Monev SPBE	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Layanan SPBE	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi serta hasil revidu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Layanan SPBE b. Kriteria huruf c telah terpenuhi, Manajemen Layanan SPBE telah diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan, dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah dilakukan revidu dan evaluasi c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada semua proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE) d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan (Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE)) e. Manajemen Layanan SPBE telah dilaksanakan (Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan)	A/B/C/D/E	B	0,75	manajemen layanan telah disusun dengan memperhatikan 3 layanan, yaitu: 1. layanan utama : layanan atas penyelenggaraan pencapaian tujuan organisasi 2. layanan manajerial : layanan yang memastikan layanan utama dan layanan pendukung berjalan dengan baik 3. layanan pendukung : layanan yang mendukung layanan utama	1. dokumen arsitektur SPBE Setjen Wantannas 2. laporan monev SPBE	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

			e. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik	<p>a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</p> <p>b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain</p> <p>c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kepegawaian seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analisis data</p> <p>d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kepegawaian seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen</p> <p>e. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kepegawaian</p>	A/B/C/D/E	B	0,75	<p>Setjen Wantannas telah mengembangkan aplikasi layanan berbasis elektronik yang bernama SIDIK (Sistem Informasi Kedisiplinan dan Kehadiran Pegawai) yang telah berkolaborasi dengan layanan keuangan dalam hal perhitungan pemberian tunjangan kinerja pegawai</p>	<p>1. Persetjen Wantannas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Manajemen Tatakelola SPBE</p> <p>2. Sistem Informasi Disiplin dan Kehadiran Pegawai (SIDIK)</p> <p>3. SAPK Badan Kepegawaian Negara</p>	<p>https://bit.ly/3ay05j8</p> <p>https://ortala.wantannas.go.id/sirebo</p>
			f. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik	<p>a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</p> <p>b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain</p> <p>c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kearsipan seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analisis data</p> <p>d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kearsipan seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen</p> <p>e. Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kearsipan</p>	A/B/C/D/E	C	0,50	<p>Setjen Wantannas telah menggunakan aplikasi umum dibidang kearsipan yaitu SRIKANDI sebagai sistem berbasis elektronik yang dapat mengakomodasi tata kelola persuratan</p>	<p>1. Persetjen Wantannas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Manajemen Tatakelola SPBE</p> <p>2. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)</p>	<p>https://bit.ly/3ay05j8</p> <p>https://ortala.wantannas.go.id/sirebo</p>
			g. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik	<p>a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</p> <p>b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan penganggaran berbasis elektronik, layanan keuangan berbasis elektronik, layanan pengadaan berbasis elektronik, layanan perencanaan, penganggaran, dan kinerja Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain</p> <p>c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan, penganggaran, dan kinerja kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analisis data</p> <p>d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait perencanaan, penganggaran, dan kinerja kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen perencanaan, dan pengunduhan dokumen perencanaan</p> <p>e. Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait perencanaan, penganggaran, dan kinerja kegiatan pemerintah</p>	A/B/C/D/E	B	0,75	<p>Setjen wantannas telah menggunakan layanan perencanaan, penganggaran, dan kinerja berbasis elektronik yaitu aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) yang telah berkolaborasi dengan layanan lainnya seperti SATU DIA (Sistem Aplikasi Terpadu Direktorat Jenderal) dan aplikasi RKAKL</p>	<p>1. Persetjen Wantannas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Manajemen Tatakelola SPBE</p> <p>2. Sistem Informasi Perencanaan (Perencanaan.dkn.go.id)</p> <p>3. Aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran)</p> <p>4. Aplikasi SATU DIA (Sistem Aplikasi Terpadu Direktorat Jenderal)</p> <p>5. Aplikasi RKAKL</p> <p>6. Aplikasi E-Kinerja ASN</p> <p>7. Aplikasi SAKTI Modul Perencanaan dan Penganggaran</p>	<p>https://bit.ly/3ay05j8</p> <p>https://ortala.wantannas.go.id/sirebo</p>
			h. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik	<p>a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan Layanan Publik Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</p> <p>b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan Layanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain</p> <p>c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan Layanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analisis data</p> <p>d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan Layanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral</p> <p>e. Layanan Publik Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah</p>	A/B/C/D/E	B	0,75	<p>portal Setjen Wantannas adalah layanan informasi yang mempublikasikan kegiatan, program kerja, capaian kinerja, dan informasi aktual lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang dapat diakses oleh publik</p>	<p>1. Persetjen Wantannas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Manajemen Tatakelola SPBE</p> <p>2. Portal Setjen Wantannas di www.wantannas.go.id</p> <p>3. Portal PPIID di www.wantannas.go.id/ppid</p> <p>4. Portal E-Gov di egov.dkn.go.id</p> <p>5. Portal LPSE di www.lpse.wantannas.go.id</p>	<p>https://bit.ly/3ay05j8</p> <p>https://ortala.wantannas.go.id/sirebo</p>
		iii.	Keterbukaan Informasi Publik	0,50			0,50			
			a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya/Tidak	Ya	1,00	<p>Setjen Wantannas telah berkomitmen dalam memenuhi kaidah-kaidah keterbukaan informasi publik dengan menyelenggarakan layanan PPIID agar pelaksanaan dan penyelenggaraan organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel</p>	<p>Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Standar Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</p>	<p>https://bit.ly/3ay05j8</p> <p>https://ortala.wantannas.go.id/sirebo</p>

				b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A/B/C	A	1,00	pelaksanaan keterbukaan informasi publik telah dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				3,00	2,80		
				i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan				0,20	0,20		
				a. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai	Ya/Tidak	Ya	1,00	Dokumen ini berisi tentang distribusi pegawai berdasarkan nama jabatan dan kelas jabatan dan digunakan untuk penyusunan kebutuhan pegawai kedepan. Dalam hal ini tertuang pada Aplikasi E-Formasi Kempanrb	1. Peraturan Sejen Wantannas Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dalam aplikasi e-formasi Kempanrb	https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun	Ya/Tidak	Ya	1,00	Dalam hal ini digunakan untuk proyeksi kebutuhan PNS selama 5 tahun	1. Peraturan Sejen Wantannas Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Penyusunan Kebutuhan 5 tahun telah disusun dalam aplikasi e-formasi Kempanrb	https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi telah dihitung dan diformalkan	a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit kerja b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit kerja c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit kerja d. Belum dilakukan Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi	A/B/C/D	A	1,00	Dokumen ini memuat jumlah formasi jabatan yang terisi (bezzeting) dihadapkan dengan kebutuhan dalam peta jabatan	1. Peraturan Sejen Wantannas Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Surat Menteri PanRB No B/1381/M.SM.04.00.2021 tentang Surat persetujuan Penetapan Perubahan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 3. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi telah disusun dalam aplikasi e-formasi kempanrb	https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi	a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A/B/C	A	1,00	Dalam hal ini perhitungan pengisian kebutuhan pegawai disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan organisasi yang dilakukan melalui proses asistensi dan persetujuan dari BKN dan Kempanrb	1. Peraturan Sejen Wantannas Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Surat Menteri PanRB No B/1381/M.SM.04.00.2021 tentang Surat persetujuan Penetapan Perubahan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 3. Screenshot Bazzeting 5 tahun pada aplikasi E-Formasi	https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif.				0,40	0,40		
				a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan	A/B/C	A	1,00	Proses penerimaan pegawai atau dalam hal ini pengisian kebutuhan ASN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan dari Kempanrb sehingga proses penerimaan mulai dari pembentukan tim panitia seleksi sampai dengan pengumuman penerimaan hasil seleksi dilaksanakan secara transparan dan objektif	Proses penerimaan CPNS pada tahun 2018 melalui proses: a. Papan pengumuman dalam website wantannas.go.id b. Papan pengumuman dalam website https://sscn.bkn.go.id	https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)	Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.	Ya/Tidak	Ya	1,00		Pendaftaran dapat dilakukan di website https://sscn.bkn.go.id	https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.	Ya/Tidak	Ya	1,00		pengumuman dapat diakses di website wantannas.go.id dan website https://sscn.bkn.go.id	https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Ya/Tidak	Ya	1,00		pengumuman dapat diakses di website wantannas.go.id dan website https://sscn.bkn.go.id	https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah	Ya/Tidak	Ya	1,00		pengumuman dapat diakses di website wantannas.go.id dan website https://sscn.bkn.go.id	https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi				0,20	0,20		
				a. Telah ada standar kompetensi jabatan	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang kompetensi jabatan	Ya/Tidak	Ya	1,00	Dokumen SKJ telah tertuang di dalam Peraturan Sejen Wantannas Nomor 15 Tahun 2019 untuk digunakan sebagai standar dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1. Peraturan Sejen Wantannas Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kanvas Kompetensi Teknis Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Telah dilakukan assessment pegawai	a. Telah dilakukan assessment kepada seluruh pegawai b. Telah dilakukan assessment kepada sebagian besar pegawai c. Telah dilakukan assessment kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan assessment pegawai	A/B/C/D	A	1,00	Kegiatan assessment atau penilaian terhadap pegawai telah dilakukan secara bertahap dan saat ini telah dilaksanakan kepada seluruh pegawai sebagai dasar maupun informasi untuk pengembangan pegawai kedepan maupun informasi potensi diri masing-masing pegawai	1. Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bagian Kepegawaian dan Hukum 2. KAK Layanan pendidikan dan pelatihan 3. Dokumentasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi	https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi b. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C/D	A	1,00	Pengembangan kompetensi pegawai disusun setiap akhir tahun berjalan untuk memastikan setiap pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup sebagai pengembangan kemampuan pegawai tersebut berdasarkan dukungan anggaran yang mencukupi	1. Laporan peningkatan kompetensi SDM 2. Dokumentasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi (sertifikat, foto, dll)	https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A/B/C/D	A	1,00	Pengembangan kompetensi pegawai disusun setiap akhir tahun berjalan untuk memastikan setiap pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup sebagai pengembangan kemampuan pegawai tersebut	1. Laporan peningkatan kompetensi SDM 2. Dokumentasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi (sertifikat, foto, dll)	https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A/B/C	A	1,00	Terdapat dokumen laporan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang telah melakukan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun struktural dengan kuesioner sebagai alat ukur	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi	https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				iv. Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka				1,20	1,20		

				a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan	Ya/Tidak	Ya	1,00	Kebijakan pengisian JPT melalui seleksi terbuka dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan dari KASN sehingga proses pengisian JPT mulai dari pembentukan tim panitia seleksi sampai dengan pengumuman penerimaan hasil seleksi pengisian JPT dilaksanakan secara terbuka, transparan dan objektif	1. Persejten Wantannas Nomor 89 Tahun 2020 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif 2. Kepsesjen Wantannas Nomor 195 tahun 2020 tentang penetapan jabatan lowong pimpinan tinggi pratama di Setjen Wantannas 3. Kepsesjen Wantannas Nomor 35 tahun 2021 tentang penetapan jabatan lowong pimpinan tinggi madya di Setjen Wantannas 4. Kepsesjen Wantannas Nomor 37 tahun 2021 tentang Tim Panitia Seleksi jabatan pimpinan tinggi madya di Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan	a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi	A/B/C/D	A	1,00		1. Persejten Wantannas Nomor 89 Tahun 2020 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif 2. Kepsesjen Wantannas Nomor 195 tahun 2020 tentang penetapan jabatan lowong pimpinan tinggi pratama di Setjen Wantannas 3. Kepsesjen Wantannas Nomor 35 tahun 2021 tentang penetapan jabatan lowong pimpinan tinggi madya di Setjen Wantannas 4. Kepsesjen Wantannas Nomor 37 tahun 2021 tentang Tim Panitia Seleksi jabatan pimpinan tinggi madya di Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif	Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif	Ya/Tidak	Ya	1,00		1. Persejten Wantannas Nomor 89 Tahun 2020 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif 2. Kepsesjen Wantannas Nomor 195 tahun 2020 tentang penetapan jabatan lowong pimpinan tinggi pratama di Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen	Ya/Tidak	Ya	1,00		1. Persejten Wantannas Nomor 89 Tahun 2020 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif 2. Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bagian Kepegawaian dan Hukum 3. Dokumentasi pelaksanaan promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi (website wantannas.go.id) 4. Kepsesjen nomor 202 tahun 2020 tentang pembentukan panitia seleksi terbuka dan kompetitif pimpinan tinggi pratama 5. Kepsesjen 197 tahun 2020 tentang pembentukan sekretariat panitia seleksi terbuka dan kompetitif pimpinan tinggi pratama 6. Kepsesjen Nomor 195 tahun 2020 tentang penetapan jabatan lowong pimpinan tinggi pratama di Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka	Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb	Ya/Tidak	Ya	1,00		1. Persejten Wantannas Nomor 89 Tahun 2020 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif 2. Kepsesjen Nomor 195 tahun 2020 tentang penetapan jabatan lowongan pimpinan tinggi pratama di Setjen Wantannas 3. Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bagian Kepegawaian dan Hukum 4. Dokumentasi pelaksanaan promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi (website wantannas.go.id)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				v. Penetapan Kinerja Individu	0,40			0,20			
				a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	a. Seluruh capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja b. Sebagian besar capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja c. Sebagian kecil capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	A/B/C/D	D	0,00	Pemberian Tunjangan Kinerja sampai saat ini masih menggunakan kehadiran pegawai sebagai standar. Setjen Wantannas telah melakukan koordinasi maupun asistensi kepada BKN untuk menggunakan aplikasi e-kinerja untuk diimplementasikan di Setjen Wantannas sehingga kedepan capaian kinerja individu digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja	Aplikasi SIDIK https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
				b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya d. Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya	A/B/C/D	A	1,00	Dokumen SKP yang terbaru telah memuat ukuran kinerja individu yang berkesesuaian dengan indikator kinerja individu di atasnya	a. Penilaian kinerja Individu sesuai dengan penilaian kinerja individu di atasnya b. SKP pegawai tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A/B/C/D/E	D	0,25	Pengukuran kinerja individu masih dilakukan secara tahunan	a. Penilaian kinerja Individu sesuai dengan penilaian kinerja individu di atasnya b. SKP pegawai tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

				d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja	A/B/C/D/E	D	0,25	monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja individu masih dilakukan secara tahunan	SKP pegawai	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				e. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya	a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya terhadap seluruh pegawai b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya terhadap sebagian besar pegawai c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya terhadap sebagian kecil pegawai d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya terhadap seluruh pegawai	A/B/C/D	A	1,00	Hasil penilaian kinerja individu digunakan dalam manajemen kepegawaian seperti promosi, mutasi dan pendidikan dan pelatihan	Laporan monitoring Evaluasi Kinerja Individu	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			vi.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0,20			0,20	1. Data disiplin pegawai melalui presensi 2. Bahan rekomendasi sidang baperjakat (Notulen Sidang Baperjakat)		
				a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku	Ya/Tidak	Ya	1,00	aturan kode etik sebagai pedoman pengambilan keputusan lebih lanjut	Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	A/B/C	A	1,00	dokumen laporan terkait pelaksanaan/implementasi dari kode etik maupun penerapan disiplin yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan lebih lanjut	Laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Sesjen Wantannas Tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward)	a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) di seluruh unit organisasi b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) di sebagian besar unit organisasi c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) di sebagian kecil unit organisasi d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) di unit organisasi	A/B/C/D	A	1,00	aturan tersebut telah dijadikan dasar pengambilan keputusan lebih lanjut	1. Persejjen Nomor 5 tahun 2020 tentang tunjangan kinerja di lingkungan Sesjen Wantannas 2. Bukti pemotongan tunkin	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			vii.	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20			0,20			
				a. Informasi faktor jabatan telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan	Ya/Tidak	Ya	1,00	Sesjen Wantannas telah menyusun dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan	Dokumen informasi faktor jabatan	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Peta jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan d. Unit organisasi belum menetapkan peta jabatan	A/B/C/D	A	1,00	Setjen Wantannas telah menetapkan peta jabatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 07 Tahun 2021 dan sesuai dengan Peraturan MenPANRB nomor 34 tahun 2011	1. Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Peta jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Surat Menteri PanRB No B/1381/M.SM.04.00.2021 tentang Surat persetujuan Penetapan Perubahan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Kelas jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan d. Unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan	A/B/C/D	A	1,00	Setjen Wantannas telah menetapkan kelas jabatan sesuai dengan Peraturan MenPANRB nomor 39 tahun 2013	1. Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Peta jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Surat Menteri PanRB No B/1381/M.SM.04.00.2021 tentang Surat persetujuan Penetapan Perubahan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKI	a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKI dan telah memberikan dampak pengembangan SDM b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKI namun belum memberikan dampak pengembangan SDM c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKI d. Evaluasi jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKI e. Evaluasi jabatan belum dilaksanakan	A/B/C/D/E	A	1,00	Evaluasi jabatan berdasarkan Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 01 Tahun 2017 telah dilaksanakan evaluasi kembali pada seluruh jabatan berdasarkan SKI dan telah memberikan dampak pengembangan SDM, yang dituangkan dalam Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 07 Tahun 2021	Evaluasi jabatan berdasarkan Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peringkat Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional telah dilaksanakan evaluasi kembali pada seluruh jabatan berdasarkan SKI dan telah memberikan dampak pengembangan SDM, yang dituangkan dalam Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Peta jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			viii.	Sistem Informasi Kepegawaian	0,20			0,20			
				a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan	Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	Ya/Tidak	Ya	1,00	sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan sistem informasi baru sesuai dinamika perkembangan organisasi	1. aplikasi SIPERAJA 2. Aplikasi SIDIK 3. Aplikasi BKN berupa MYSAPK 4. Aplikasi Sisfopers untuk personil dari TNI	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan	a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian d. Seluruh unit organisasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian	A/B/C/D	A	1,00	pengembangan dan pemutakhiran sistem informasi telah tertuang didalam RKAKL	1. Aplikasi SIDIK 2. Aplikasi BKN berupa MYSAPK 3. Aplikasi Sisfopers untuk personil dari TNI	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya/Tidak	Ya	1,00	dalam hal ini sistem informasi mendukung manajemen SDM dalam mengambil kebijakan	1. Aplikasi SIDIK 2. Aplikasi BKN berupa MYSAPK 3. Aplikasi Sisfopers untuk personil dari TNI	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Ya/Tidak	Ya	1,00	Sistem informasi yang dibangun bersifat interface dalam arti pegawai dapat berinteraksi tanpa harus tatap muka	1. Aplikasi SIDIK 2. Aplikasi BKN berupa MYSAPK	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50			2,50			
			i.	Keterlibatan pimpinan	1,00			1,00			

				a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Belum ada pimpinan yang terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Belum ada pimpinan yang terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A/B/C/D	A	1,00	dalam penyusunan rencana strategis Setjen Wantannas tahun 2020-2024 telah melibatkan seluruh pimpinan unit sebagaimana yang tertuang dalam Kepesjesen Nomor 58 Tahun 2019 tentang penetapan tim renstra	1. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional tahun 2020 - 2024 2. Surat undangan No UND-30/PR.01/2020 perihal Rapat pemutakhiran Renstra Wantannas 2020 - 2024 3. Kepesjesen Nomor 58 Tahun 2019 tentang penetapan tim renstra 4. Dokumentasi penyusunan renstra Setjen Wantannas Tahun 2020 - 2024	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Belum ada pimpinan yang terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A/B/C/D	A	1,00	menindaklanjuti Nodin 01/PR.02/2022 Perihal permintaan dokumen PK TA 2022 setiap unit telah menyusun perjanjian kinerja TA 2022 dan telah disetujui oleh pimpinan unit eselon 1 dan eselon 2 dari masing - masing unit kerja	1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 2. Dokumentasi Penyerahan Perjanjian Kinerja Unit Kerja 2021 dan 2022 3. Nodin 1251/PR.01/2020 Perihal Penyampaian dokumen PK TA 2021 dan Nodin 01/PR.02/2022 Perihal permintaan dokumen PK TA 2022	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Belum ada pimpinan yang memantau pencapaian kinerja secara berkala	A/B/C/D	A	1,00	pada tahun 2021 dan 2022 (sedang berlangsung) pimpinan telah melakukan pemantauan terhadap pencapaian kinerja (secara berkala) berupa kegiatan rapat evaluasi kinerja setiap triwulan dan tertuang dalam laporan periodik dari masing - masing unit kerja	1. LAKIP tahun 2021 2. Laporan periodik (Triwulan) 3. Dokumen acara Evaluasi Triwulan 1 s/d IV TA 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Pimpinan telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah	a. Pimpinan memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah c. Peran pimpinan hanya menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada	A/B/C/D	A	1,00	1. dokumen rencana strategis Setjen Wantannas TA 2020 - 2024 telah disetujui oleh Sesjen Wantannas sebagai pimpinan lembaga yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional tahun 2020 - 2024 2. mengenai strategi pencapaian renstra Setjen Wantannas TA 2020 - 2024 yang tertuang dalam IKU dan IKU Manual 2020-2024 telah disetujui oleh Sesjen Wantannas sebagai pimpinan lembaga melalui Persetjen No. 25 tahun 2020	1. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional tahun 2020 - 2024 2. Persetjen No. 25 tahun 2020 tentang IKU dan IKU Manual 2020-2024 di Lingkungan Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				e. Pimpinan memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun	a. Pimpinan memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun c. Peran pimpinan hanya menandatangani dokumen perencanaan kinerja tahunan d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada	A/B/C/D	A	1,00	dokumen perjanjian kinerja lembaga dan unit kerja telah ditandatangani dan disetujui oleh Sesjen Wantannas	1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 2. Dokumen RAK Tahun 2021 dan 2022 3. Dokumentasi Penandatanganan dan Penyerahan Perjanjian Kinerja dan RAK (foto, notulen)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				f. Pimpinan memantau rencana aksi kinerja secara berkala	a. Pimpinan tindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala b. Pimpinan memantau pencapaian rencana aksi secara berkala c. Pimpinan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja	A/B/C/D	A	1,00	pencapaian rencana aksi kinerja telah dipantau dan dimonitor oleh Sesjen Wantannas melalui rapat evaluasi kinerja setiap triwulan	1. Dokumen rencana aksi kinerja Tahun 2021 dan 2022 2. Dokumentasi rapat monev kinerja (foto, nodin, notulen) 3. Laporan Monev Kinerja Periodik (Triwulan)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			ii.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja				1,50			
				a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menngani akuntabilitas kinerja	a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menngani akuntabilitas kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menngani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menngani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menngani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	A	1,00	seluruh unit telah melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menngani akuntabilitas kinerja, seperti: 1. biro PSP mengikuti diklat maturitas SPIP 2. biro POK mengikuti diklat maturitas SPIP 3. biro umum mengikuti diklat maturitas SPIP 4. seluruh Kedeputian mengikuti sosialisasi SPIP, RSPP	1. Dokumentasi sosialisasi yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja (foto dan notulen) 2. Benchmarking SAKIP dengan Kempenpothukam Tahun 2021, Pemprov Jogja dan pemda Jogja Tahun 2022 3. Bimtek Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021 4. Sertifikat SPIP, RSPP, ISO 9001:15	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja	Ya/Tidak	Ya	1,00	Setjen Wantannas telah memiliki pedoman akuntabilitas kinerja yang tertuang dalam Kepesjesen Wantannas Nomor 84/Sesjen/XII/2013, Perpesjen Wantannas Nomor 42 Tahun 2020, Persetjen No. 25 tahun 2020, Persetjen Wantannas Nomor 6 tahun 2021, dan Persetjen Wantannas Nomor 65 Tahun 2020	1. Kepesjesen Wantannas Nomor 84/Sesjen/XII/2013 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Perpesjen Wantannas Nomor 42 Tahun 2020 tentang rencana strategis Dewan Ketahanan Nasional 3. Persetjen No. 25 tahun 2020 tentang IKU dan IKU Manual 2020-2024 di Lingkungan Setjen Wantannas 4. Perpesjen Wantannas Nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja di Lingkungan Setjen Wantannas 5. Persetjen Wantannas Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A/B/C/D/E	A	1,00	pada tahun 2021 dan 2022 telah dilakukan pemutakhiran data kinerja secara bulanan melalui e-monev bappenas dan upload data kinerja; Renja; IKU; PK; rencana aksi kinerja pada aplikasi esr.menpan.go.id setiap tahun	1. LAKIP tahun 2021 2. Laporan Periodik Tahun 2021 dan 2022 3. screenshot aplikasi esr dan e-monev bappenas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			7	PENGUATAN PENGAWASAN				2,50			
				i. Gratifikasi				0,30			
				a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi	Ya/Tidak	Ya	1,00	Setjen Wantannas telah memiliki kebijakan penanganan gratifikasi	Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

				b. Telah dilakukan <i>public campaign</i>	a. <i>Public campaign</i> telah dilakukan secara berkala b. <i>Public campaign</i> dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan <i>public campaign</i>	A/B/C	A	1,00	Setjen Wantannas melalui Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah melaksanakan public campaign namun dilakukan tidak secara berkala	1. Sosialisasi mengenai gratifikasi yang menghadirkan narasumber dari KPK dan diikuti oleh seluruh pegawai Setjen Wantannas, Surat Edaran Nomor SE-01/Pl.04.04/2021 Tentang Sosialisasi Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS, dan Pengaudian Masyarakat 2. Penyediaan media publikasi melalui google site bit.ly/UPGSetjenWantannas, telah diinformasikan kepada seluruh pegawai dan dapat dengan mudah diakses karena berbasis google dan terdapat sarana pembelajaran berbentuk video dan dokumen portable (pdf) 3. Benchmarking mengenai Gratifikasi yang menghadirkan narasumber dari Tim Unit Pengendalian Gratifikasi LAN dan diikuti perwakilan dari Biro (dokumentasi akan di update)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi	Ya/Tidak		Blm Disisi	Tim UPG secara berkala (per semester) melaporkan hasil implementasi pengendalian gratifikasi pada Setjen Wantannas	1. Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi penanganan Gratifikasi Semester II Tahun 2021 Setjen Wantannas; 2. Dokumen surat pernyataan penolakan/penerimaan Gratifikasi di Lingkungan Setjen Wantannas 3. Dokumen Laporan UPG Setjen Wantannas ke KPK Triwulan I, II, III, dan IV TA.2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya/Tidak		Blm Disisi	Berdasarkan pelaporan hasil implementasi pengendalian gratifikasi	1. Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi penanganan Gratifikasi Semester II Tahun 2021 Setjen Wantannas; dan terdapat dokumen penyetor yang kemudian dilaporkan ke KPK pada Triwulan I, II, III, dan IV TA 2021, atas hasil evaluasi tersebut, KPK menerbitkan laporan hasil evaluasi berupa: 2. Dokumen Hasil Evaluasi dari KPK berdasarkan hasil evaluasi bahwa kebijakan UPG Setjen Wantannas no 2 tahun 2019 perlu direvisi, belum terdapatnya laporan penolakan/penerimaan Gratifikasi, belum menyertakan Eksternal dalam kegiatan pengendalian Gratifikasi, belum melaksanakan e-learning, dan mitigasi risiko belum maksimal	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				e. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya/Tidak	Ya	1,00	Tim UPG Setjen Wantannas berdasarkan hasil evaluasi dari KPK, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti diantaranya telah merevisi kebijakan pengendalian gratifikasi dengan diformalkannya Persesjen 3 Tahun 2021, atas dasar kebijakan terbaru mewujudkan setiap pegawai melaporkan penolakan dan penerimaan dan hasilnya terdapat laporan penerimaan Gratifikasi, telah memetakan kembali risiko gratifikasi, namun terkait e-learning telah dikonfirmasi kepada KPK bahwa fasilitas e-learning KPK sedang dalam perbaikan dan menyertakan eksternal dalam kegiatan pengendalian gratifikasi akan menjadi agenda selanjutnya, laporan tindak lanjut tersebut telah dimuat pada	Laporan tindak lanjut hasil evaluasi penanganan gratifikasi	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			ii.	Penerapan SPIP	0,30			0,30			
				a. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya/Tidak	Ya	1,00	Peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP termuat dalam: Peraturan Setjen Wantannas Nomor 13 Tahun 2019 Tentang pedoman teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan sekretariat jenderal dewan ketahanan nasional.	Peraturan Setjen Wantannas Nomor 13 Tahun 2019 Tentang pedoman teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan sekretariat jenderal dewan ketahanan nasional.	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Telah dibangun lingkungan pengendalian	a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian c. Belum ada pembangunan lingkungan pengendalian	A/B/C	A	1,00	Setjen Wantannas telah membangun lingkungan pengendalian	1. Peraturan Setjen Wantannas Nomor 13 Tahun 2019 Tentang pedoman teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan sekretariat jenderal dewan ketahanan nasional. 2. Keputusan Setjen Wantannas Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. 3. Laporan hasil pelaksanaan penilaian mandiri maturitas oleh Tim Penilai Maturitas SPIP Setjen Wantannas pada tahun 2021 berada pada level 4, konfirmasi nilai 4.023 dengan definisi Terkelola dan Terukur (menunggu penyesuaian aplikasi penilaian SPIP Terintegrasi) 4. Laporan penyelenggaraan SPIP Semester I dan II TA.2021 5. manajemen dan APIP telah mengikutidiklat SPIP terintegrasi terlampir dokumentasi diklat SPIP terintegrasi dalam rangka penyelenggaraan SPIP terintegrasi Tahun 2021 6. Telah dilaksanakan sosialisasi SPIP Terintegrasi berdasarkan pedoman terbaru Perban BPKP No. 5 Tahun 2021, terlampir dokumentasi pelaksanaan sosialisasi 7. Surat Keputusan No.xxx penilai SPIP Terintegrasi, ST No. xxx t/m Penjamin Kualitas dan SK Penyelenggara (Unit Penyelenggara, Penilai dan Penjamin Kualitas)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi	a. Seluruh organisasi telah melakukan penilaian risiko b. Sebagian besar organisasi telah melakukan penilaian risiko c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan penilaian risiko d. Belum dilakukan penilaian risiko	A/B/C/D	A	1,00	Setjen Wantannas telah melakukan penilaian risiko atas organisasi	Laporan Penerapan Manajemen Risiko Setjen Wantannas TA. 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	A/B/C/D	A	1,00	Setjen Wantannas telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	1. Laporan Hasil Audit Internal Triwulan TA 2021 2. Laporan Hasil Reviu TA 2021 3. Laporan Wasdal pengelolaan BMN 4. Laporan Pengendalian Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan, dan Dumas 5. Laporan Penerapan Manajemen Risiko Setjen Wantannas TA.2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

				e. Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	A/B/C/D	A	1,00	Setjen Wantannas telah menginformasikan dan mengkomunikasikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) kepada seluruh pihak terkait	1. Sosialisasi Penganan dan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP terintegrasi dengan mengundang narasumber dari BPKP 2. undangan,dafar hadir dan foto terkait sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				f. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A/B/C	A	1,00	Setjen Wantannas telah melakukan pemantauan pengendalian intern	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Setjen Wantannas periode semesteran TA 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				g. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI	a. Seluruh unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI b. Seluruh unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI c. Seluruh unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi belum secara berkala d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI	A/B/C/D	A	1,00	Unit kerja pada Setjen Wantannas telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI	Laporan Monev Penerapan SPIP Semester I dan Semester II thn 2021 (tentatif)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				iii. Pengaduan Masyarakat				0,50			
				a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan	Ya/Tidak	Ya	1,00	Setjen Wantannas telah menyusun dan menetapkan kebijakan pengaduan masyarakat	Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	a. Seluruh organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat b. Sebagian besar organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat c. Sebagian kecil organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat d. Penanganan pengaduan masyarakat belum diimplementasikan	A/B/C/D	A	1,00	Setjen Wantannas telah mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Semester I dan II Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	A/B/C/D	A	1,00	Setjen Wantannas telah menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat	Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Semester I dan II Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	1,00	Setjen Wantannas telah melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Semester I dan II Tahun 2022	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya/Tidak	Ya	1,00	Setjen Wantannas telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Semester I dan II Tahun 2023	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				iv. Whistle Blowing System				0,30			
				a. Telah terdapat Whistle Blowing System	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System	Ya/Tidak	Ya	1,00	Setjen Wantannas telah mempunyai kebijakan Whistle Blowing System (WBS)	Peraturan Sesjen Wantannas 05 tahun 2018 tentang tata cara penanganan pelaporan dugaan pelanggaran whistleblowing system di lingkungan sekretariat jenderal dewan ketahanan nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Whistle Blowing System telah disosialisasikan	a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi d. Whistle blowing system belum disosialisasikan	A/B/C/D	A	1,00	Whistle blowing system telah disosialisasikan ke seluruh organisasi	1. Banner, Stiker, website, buku, 2. Sosialisasi mengenai Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS, dan Pengaduan Masyarakat yang menghadirkan narasumber dari KPK dan diikuti oleh seluruh pegawai Setjen Wantannas, Surat Edaran Nomor SE-01/Pl.04.04/2021 Tentang Sosialisasi Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS, dan Pengaduan Masyarakat	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Whistle Blowing System telah diimplementasikan	Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan	Ya/Tidak	Ya	1,00	kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan	1. Keputusan Sesjen Wantannas Nomor 157 Tahun 2020 Tentang Tim Whistleblowing System Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Laporan Monev WBS Semester I dan II Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System	a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System	A/B/C	A	1,00	Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala	Laporan Monev WBS Semester I dan II Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				e. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1,00	Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Laporan Monev WBS Semester I dan II Tahun 2022	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				v. Penanganan Benturan Kepentingan				0,30			
				a. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan	Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	Ya/Tidak	Ya	1,00	Telah terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan pada Setjen Wantannas	Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 53 tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian besar unit organisasi c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian kecil unit organisasi d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan	A/B/C/D	A	1,00	Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi pada Setjen Wantannas	Sosialisasi mengenai Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS, dan Pengaduan Masyarakat yang menghadirkan narasumber dari KPK dan diikuti oleh seluruh pegawai Setjen Wantannas, Surat Edaran Nomor SE-01/Pl.04.04/2021 Tentang Sosialisasi Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS, dan Pengaduan Masyarakat	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya/Tidak	Ya	1,00	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan pada Setjen Wantannas	laporan pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Semester I dan II Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

				d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	1,00	Penanganan Benturan Kepentingan telah dimonitoring dan evaluasi secara berkala	Laporan pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Semester I dan II Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	a. Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan	A/B/C/D	A	1,00	Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Laporan pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Semester I dan II Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			vi.	Pembangunan Zona Integritas				0,40			
				a. Telah dilakukan pencanangan zona integritas	Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan	Ya/Tidak	Ya	1,00	Setjen Wantannas mengajukan Deputi Politik dan Strategi sebagai unit pencanangan Zi menuju WBK	1. Dokumen Pencanangan Zona Integritas 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 3. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan sebagai Zi menuju WBK	Ya/Tidak	Ya	1,00	Telah terdapat Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan sebagai Zi menuju WBK	1. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Pembentukan TPI Zi 2. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Telah dilakukan pembangunan zona integritas	a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	A/B/C	A	1,00	Pembangunan Zona Integritas dilakukan secara intensif sesuai pedoman Permenpan RB No. 10 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas,	1. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021 3. Instruksi Sesjen tentang Dokumen Rencana Pembangunan Zi	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	a. Monitoring dan evaluasi atas zona integritas dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi atas zona integritas dilakukan tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi atas zona integritas	A/B/C	A	1,00	Monitoring dan evaluasi atas zona integritas telah dilakukan secara berkala terkait Proses Pembangunan Zi	1. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021 2. Keputusan Sesjen Wantannas Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pembentukan TPI Zi menuju WBK di lingkungan Setjen Wantannas 3. LKE Zi Tahun 2021 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Zona Integritas di Lingkungan Setjen Wantannas Semester I dan II Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				e. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"	a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK	A/B/C	C	0,00	Setjen Wantannas belum memiliki unit kerja berpredikat menuju WBK berdasarkan hasil evaluasi dari Kemempnan RB, namun Setjen Wantannas setiap tahun terus mencanangkan dan membangun unit Zi	Laporan Hasil Evaluasi RB dari Kemempnan RB Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			vii.	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)				0,30			
				a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. Sebagian besar rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir	A/B/C/D	A	1,00	Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir	1. Laporan hasil audit TW I, II, III, IV tahun anggaran 2021 2. Disposisi Sesjen Wantannas Nomor 4532/SP/2021 Catatan hasil Reviu Usulan RKA-K/L TA 2021 3. Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 4. Disposisi Sesjen Wantannas Nomor 4091/SP/2021 atas audit tunjangan kinerja TA 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.	a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas	A/B/C/D	A	1,00	Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas,	1. SDM APIP telah tergabung dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPII) 2. Sertifikasi pembentukan auditor ahli pertama dari BPKP 3. Sertifikasi Diklat teknik audit berbantuan komputer 4. Sertifikasi Diklat substansi penilaian SPIP 5. Sertifikasi Bimtek Manajemen Risiko SPBE dari KemenPANRB	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai	a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran	A/B/C/D	A	1,00	Seluruh kebutuhan Pengawasan Internal didukung oleh anggaran, dokumen data dukung meliputi	RKAKL Tahun 2021 dan Tahun 2022	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko	a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko	A/B/C/D	A	1,00	Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko telah termuat pada PKPI berbasis Risiko	Persetjen Wantannas Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPI) Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				2,50			
			i.	Standar Pelayanan				0,40			
								2,46			
								0,40			

			a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	A/B/C/D/E	A	1,00	Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Kepesjren Nomor 52 Tahun 2013	1. Kepesjren Nomor 52 Tahun 2013 tentang standard pelayanan unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas 2. Maklumat pelayanan tahun 2020	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan	A/B/C/D	A	1,00	Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan sebagaimana tertuang dalam Kepesjren Nomor 52 Tahun 2013 dan dipublikasikan pada website Wantannas	1. Maklumat pelayanan tahun 2020 2. telah dipublikasikan dalam website Wantannas 3. Kepesjren Nomor 52 Tahun 2013 tentang standard pelayanan unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	A/B/C/D	A	1,00	sudah dilakukan reviu dan perbaikan atas pelayanan Setjen Wantannas dan menambah fungsi kegiatan	1. proses review dan perbaikan standar pelayanan mengikutsertakan stakeholders (notulen, foto, dan nodin) : a. Hasil reviu keterbukaan informasi publik bersama KIP b. Sosialisasi Tata Kelola PPIID 2. telah ada laporan Hasil Review dan Perbaikan Standar Pelayanan tahun 2021 3. Pelaksanaan kegiatan sosial (Vaksinasi Nasional) 4. Menginisiasi temu awak media nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
ii.			Budaya Pelayanan Prima	0,40			0,40			
			a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	A/B/C/D	A	1,00	Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkala, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	1. Pelatihan Sosialisasi PPIID tahun 2021 2. Pelatihan Penyusunan Indeks Keamanan Informasi dengan BSSN tahun 2021 3. Pelatihan Penulisan Berita Cipta Tahun 2021 4. Pelatihan Fotografi Tahun 2021 5. Pelatihan Penulisan Jurnal Tahun 2021 6. Pelaksanaan kegiatan sosial (Vaksinasi Nasional) 7. Menginisiasi temu awak media nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website /media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website /media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses	A/B/C/D	A	1,00	Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional	1. Screenshot website (www.wantannas.go.id), majalah, dan buletin (Ctral, Instagram (IG:@setjen_wantannas), youtube (Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional), email (setjen@wantannas.go.id) 2. Terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional : a. RRI b. KOMINFO (bako humas) c. ANTARA d. LKPP (LPSE, E-catalog) e. KPK (GOL) f. Kemenkumham (DIJH) g. ANRI (srikandi) h. Kemensanb (SPAN LAPOR)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	A/B/C/D	A	1,00	Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan sebagaimana tertuang dalam Kepesjren Nomor: Kep-90/Sejren/IX/2015	1. Kepesjren Nomor: Kep-90/Sejren/IX/2015 Tentang Sistem Penghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment) Bagi Pelaksana Layanan dan Kompensasi Bagi Penerima Layanan di Lingkungan Setjen Wantannas 2. Kepesjren Wantannas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	A	1,00	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan	Kepesjren Nomor: Kep-90/Sejren/IX/2015 Tentang Sistem Penghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment) Bagi Pelaksana Layanan dan Kompensasi Bagi Penerima Layanan di Lingkungan Setjen Wantannas.	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			e. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu, namun sarana prasarana layanan belum memenuhi standar sarpras d. Apabila pelayanan belum terpadu	A/B/C/D	A	1,00	Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras melalui website Wantannas dan PPIID	1. www.wantannas.go.id, 2. website PPIID, 3. aplikasi lainnya (SIMDOJKI, SIDIK)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

				f. Telah terdapat inovasi pelayanan	a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh instansi lain c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain d. Belum terdapat inovasi pelayanan	A/B/C/D	A	1,00		Inovasi pelayanan tahun 2021 dalam bentuk percepatan vaksinasi nasional (sistem pentahelix) dengan lokasi di Jawa Barat telah mendapatkan pengakuan secara nasional sebagaimana dhadiri langsung oleh Wapres dan sambutan pelaksanaan dari Presiden dan telah direplikasi oleh instansi lain	1. Sprint Pelaksanaan Kegiatan 2. Laporan pelaksanaan kegiatan 3. Dokumentasi kegiatan	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				iii. Pengelolaan Pengaduan	0,60			0,56				
				a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan	a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPORI b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPORI c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan	A/B/C/D/E	B	0,75		Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPORI	Telah ada layanan sarana kontak/pengaduan/saran pada website Setjen Wantannas dan terintegrasi dengan SP4N-LAPORI Dengan petugas khusus yang menangani dalam Kepejsesjen Wantannas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPORI di level Organisasi b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPORI di level unit kerja c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPORI di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPORI di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPORI di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPORI di level unit kerja	A/B/C/D	A	1,00		Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPORI di level Organisasi	1. Kepejsesjen Wantannas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Setjen Wantannas 2. Unit pengelola khusus adalah Biro PSP	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan	A/B/C/D	A	1,00		Tindak lanjut pengaduan tercantum dalam Laporan Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi Tahun 2021	Isaporan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi secara berkala (semester) Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	A/B/C	A	1,00		Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala	Laporan Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,70			0,70				
				a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C/D/E	A	1,00		Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun	a. Laporan IKM TW I Tahun 2021 b. Laporan IKM TW II Tahun 2021 c. Laporan IKM TW III Tahun 2021 d. Laporan IKM TW IV Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	A/B/C	A	1,00		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline	Laporan dapat diakses di website Setjen Wantannas dan dapat diakses secara online dan offline	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	A	1,00		Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat dengan meningkatkan sarana dan prasarana	Laporan Tindak Lanjut IKM Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				v. Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40			0,40				
				a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A/B/C/D	A	1,00		Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan	1. aplikasi KRISNA, SAKTI (Perencanaan) 2. aplikasi OM-SPAN, SILABI, SAIBA (keuangan) 3. SPAOT, SIREBO, SI PUT-SMS (ortala) 4. SIDIK, E-Kinerja (Kepegawaian) 5. SIMAK BDM, RCBM, SIPKB (perencanaan) 6. SRIKANDI (TUP) 7. E-MAWASPNBR, GOL (Wasin)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C	A	1,00		Perbaikan dilakukan secara terus-menerus sebagaimana tertuang dalam 19 Isaporan pemeliharaan peralatan sitem informasi	Laporan Kegiatan Pengelolaan Siso Upgrade Pemeliharaan dan Update Sistem (nota dinas online menjadi kesekretaratan)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				ii. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN	10,00			0,55				
				i. Sistem Merit				0,00				
				- Indeks Sistem Merit	Penilaian menggunakan instrumen tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah (Peraturan KASN Nomor 9/2019) yang dilakukan oleh KASN dengan Skala 0-400	Indeks		0,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				ii. Kualitas Kebijakan				0,00				
				- Indeks Kualitas Kebijakan	Penilaian menggunakan Nilai LAN dengan skala 0-100	Indeks		0,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				iii. Kualitas Pengelolaan Aset				0,00				
				- Indeks Pengelolaan Aset	Penilaian menggunakan Hasil Indeks Pengelolaan Aset yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan skala 0-4	Indeks		0,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				iv. Aparatur Sipil Negara yang Profesional				0,00				

				- Indeks Profesionalitas ASN	Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (Peraturan BKN Nomor 8/2019) dengan skala 0-100	Indeks	0,00					https://bit.ly/3ay05j8
		v.		Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian menggunakan Hasil Evaluasi SPBE Kementerian PANRB dengan skala 1-5	Indeks	1,00		0,20			https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		vi.		Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Penilaian menggunakan Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh LKPP dengan skala 0-100	Indeks	0,00		0,00			https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		vii.		Kualitas Pengelolaan Anggaran	Penilaian menggunakan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan skala 0-100	Indeks	0,00		0,00			https://bit.ly/3ay05j8
		viii.		Kualitas Pelayanan Publik	Penilaian menggunakan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan skala 0-5	Indeks	0,00		0,00	Berita Acara Hasil Evaluasi Biro PSP		https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		ix.		Kapabilitas APiP	Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APiP (Perka BPKP Nomor 16/2015) yang dilakukan oleh BPKP dengan skala 0-5	Indeks	1+		0,23			https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		x.		Maturitas SPIP	Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP (Perka BPKP Nomor 4/2016) yang dilakukan oleh BPKP dengan skala 0-5	Indeks	1+		0,23			https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		xi.		Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Penilaian merupakan hasil survei kepatuhan K/L/D terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 dengan membagi tiga tingkatan kepatuhan (tinggi, sedang, rendah). Dilaksanakan berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI dengan skala 0-100	Indeks	0,00		0,00			https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		xii.		Kualitas Pengelolaan Arsip	Penilaian menggunakan Hasil Pengawasan Kearsipan (Perka ANRI Nomor 6/2019) yang dilakukan oleh ANRI dengan skala 0-100	Indeks	0,00		0,00			https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		III. REFORM (30)							#DIV/0!			
		1. MANAJEMEN PERUBAHAN							#DIV/0!			
		i. Komitmen dalam Perubahan							3,50			
			a.	Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di instansi	1 Agen 1 Perubahan	%	100,00%	1,00		Telah ditunjuk dan ditetapkan 9 pegawai sebagai agen perubahan di lingkungan Setjen Wantannas dengan masing masing merencanakan 1 perubahan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional nomor ... tahun 2020	1. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional nomor ... tahun 2020 Tentang Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Rencana Kerja Agen Perubahan Setjen Wantannas 3. Laporan Monev rencana kerja Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 3. Dokumentasi kegiatan Agen Perubahan (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah Agen Perubahan	Jumlah		3,00	3,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah Perubahan yang dibuat	Jumlah		3,00	3,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b.	Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen	Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan	%	100,00%	1,00		Perubahan/inovasi yang dibuat oleh agen perubahan telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan	1. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Rencana Kerja Agen Perubahan Setjen Wantannas 3. Laporan Monev rencana kerja Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 3. Dokumentasi kegiatan Agen Perubahan (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah Perubahan yang dibuat	Jumlah		3,00	3,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen	Jumlah		3,00	3,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			c.	Instansi mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan (reform)	Bentuk perubahan (reform) yang dilakukan unit kerja, misalnya: pembangunan zona integritas, pembuatan inovasi, dsb	%	100,00%	1,00		Perubahan/inovasi yang dibuat oleh agen perubahan telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan	1. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Rencana Kerja Agen Perubahan Setjen Wantannas 3. Laporan Monev rencana kerja Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 3. Dokumentasi kegiatan Agen Perubahan (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah unit kerja seluruhnya	Jumlah		3,00	3,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah unit kerja yang melakukan perubahan	Jumlah		3,00	3,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		ii. Komitmen Pimpinan							0,50			
			a.	Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan instansinya	a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan instansi dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan instansi dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan instansi dan sebagian kecil (di bawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan instansi, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian reformasi di dokumen perencanaan instansi	A/B/C/D/E	A	1,00		Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan instansi dan sebagian besar sudah tercapai	1. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 68 tahun 2020 Tentang Roadmap RB Setjen Wantannas Tahun 2020-2024 2. Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 3. Laporan Monev RB Triwulanan 4. Laporan pelaksanaan RB triwulanan 5. Laporan Tindak Lanjut atas monev RB semesteran 6. Dokumentasi kegiatan RB (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

				b. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya perhatian khusus kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi		%	0,00%	0,00	penghargaan tentang capaian kinerja pelaksanaan anggaran dan capaian output kepada Deputi Sistem Nasional	1. sertifikat penghargaan 2. dokumentasi	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi	Berhasil melaksanakan reformasi ditandai dengan adanya penghargaan dari Kementerian PANRB/Ombudsman RI/KPK kepada unit kerja tersebut (Misalnya: Predikat WBK/WBBM, penghargaan pelayanan publik, penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik Ombudsman RI, penghargaan penilaian integritas KPK)	Jumlah	0,00%				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah unit kerja yang mendapat reward/perhatian khusus dari Pimpinan	Reward/perhatian khusus pimpinan berupa perlakuan khusus pimpinan terhadap unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi dibanding yang belum berhasil, misalnya: adanya alokasi anggaran khusus untuk unit kerja yang telah berhasil, pemberian penghargaan berupa promosi untuk pimpinan unit kerja yang berhasil, atau bentuk penghargaan lainnya	Jumlah	1,00%				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			iii.	Membangun Budaya Kerja	0,50		0,00	#DIV/0!			
				- Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi	A/B/C/D	7,00%	Blim Dilisi	Terdapat Surat Edaran: 1. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang pembatasan cuti tahunan pegawai pada periode hari libur nasional tahun 2022 di lingkungan Setjen Wantannas 2. Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyesuaian jam kerja pegawai dalam masa pandemi covid-19 di lingkungan Setjen Wantannas 3. Surat Edaran nomor 32 tahun 2022 tentang jam kerja pegawai pada bulan ramadhan 1443 hijriah di lingkungan Setjen Wantannas 4. Surat Edaran nomor SE-137/KH.03.01.01/2021 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 5. Surat Edaran nomor SE-96/KH.02.02.03/2021 tentang optimalisasi penggunaan aplikasi absensi online "SIDIK WANTANNAS" di lingkungan Setjen Wantannas 6. Surat Edaran nomor DE-04/KH.02.01.11/2021 tentang Setjen Wantannas peduli bencana alam 7. Peraturan Setjen Wantannas nomor 2 tahun 2021 tentang pedoman penggunaan seragam dan atribut kerja pegawai di lingkungan Setjen Wantannas	1. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang pembatasan cuti tahunan pegawai pada periode hari libur nasional tahun 2022 di lingkungan Setjen Wantannas 2. Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyesuaian jam kerja pegawai dalam masa pandemi covid-19 di lingkungan Setjen Wantannas 3. Surat Edaran nomor 32 tahun 2022 tentang jam kerja pegawai pada bulan ramadhan 1443 hijriah di lingkungan Setjen Wantannas 4. Surat Edaran nomor SE-137/KH.03.01.01/2021 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 5. Surat Edaran nomor SE-96/KH.02.02.03/2021 tentang optimalisasi penggunaan aplikasi absensi online "SIDIK WANTANNAS" di lingkungan Setjen Wantannas 6. Surat Edaran nomor DE-04/KH.02.01.11/2021 tentang Setjen Wantannas peduli bencana alam 7. Peraturan Setjen Wantannas nomor 2 tahun 2021 tentang pedoman penggunaan seragam dan atribut kerja pegawai di lingkungan Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			2	DEREGULASI KEBIYAKUAN	3,00	D	0,00	2,61			
				i. Peran Kebijakan	2,00	D	0,00	2,00			
				a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya	a. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya b. Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya c. Belum memiliki peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit dengan kebijakan lainnya	A/B/C	A	1,00	Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih/ peraturan yang saling bertentangan	1. Persetjen Wantannas Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Tata cara pembentukan perundang-undangan Persetjen dan Kepsesjen 2. Dokumentasi penyampalan naskah konsepsi usulan pembentukan Persetjen dan Kepsesjen 3. Nodin penyampalan Laporan Identifikasi keputusan periode 2008-2021 dan peraturan periode 2012-2021 4. Aplikasi JDH 5. Naskah konsepsi usulan pembentukan persetjen tahun 2021 yaitu persetjen no 1 tahun 2021 tentang SPBE dan Naskah konsepsi usulan pembentukan persetjen tahun 2022 yaitu persetjen tentang jadwal retensi arsip	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi	Persentase diperoleh dari Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi dibagi dengan Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit	%	100,00%	1,00	kebijakan yang diterbitkan telah memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi	1. Persejten Nomor 43 Tahun 2020 tentang pengaduan masyarakat 2. Persejten Nomor 6 Tahun 2018 tentang standar prosedur layanan informasi dan dokumentasi 3. Persejten nomor 2 tahun 2022 tentang peta proses bisnis	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit		Jumlah	5,00		kebijakan yang diterbitkan telah memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi	1. Persejten Nomor 43 Tahun 2020 tentang pengaduan masyarakat 2. Persejten Nomor 6 Tahun 2018 tentang standar prosedur layanan informasi dan dokumentasi 3. Persejten nomor 2 tahun 2022 tentang peta proses bisnis 4. Kepsesjen Wantannas Nomor 58/SK/VI/2012 tentang Pedoman Tata Kelola Keamanan Informasi 5. Kepsesjen Wantannas Nomor Kep-73/SE/SEN/IX/2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi		Jumlah	5,00		kebijakan yang diterbitkan telah memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi	1. Persejten Nomor 43 Tahun 2020 tentang pengaduan masyarakat 2. Persejten Nomor 6 Tahun 2018 tentang standar prosedur layanan informasi dan dokumentasi 3. Persejten nomor 2 tahun 2022 tentang peta proses bisnis 4. Kepsesjen Wantannas Nomor 58/SK/VI/2012 tentang Pedoman Tata Kelola Keamanan Informasi 5. Kepsesjen Wantannas Nomor Kep-73/SE/SEN/IX/2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			ii.	Penyelesaian Kebijakan	1,00		0,61				
				Penyelesaian kebijakan sesuai dengan Program Legislasi K/L/Pemda	Persentase diperoleh dari jumlah kebijakan di diterbitkan sesuai dalam program legislasi K/L/Pemda dibagi dengan jumlah total kebijakan yang ada dalam program legislasi K/L/Pemda (Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Peraturan Menteri/Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	%	61,11%	0,61	dari 18 usulan persetjen yang telah ditetapkan dalam progtuk, 7 diantaranya belum/tidak ditetapkan dengan rincian: 2 usulan ditolak/dibatalkan, 5 usulan masih dalam proses dan masuk kedalam progtuk tahun 2022	Progtuk tahun 2021 sebanyak 18 Persejten telah ditetapkan sebanyak 12 Persejten	
				- Jumlah total kebijakan yang ada dalam program legislasi K/L/Pemda		Jumlah	18,00				
				- Undang-Undang		Jumlah	0,00				
				- Peraturan Pemerintah		Jumlah	0,00				
				- Peraturan Presiden		Jumlah	0,00				

				a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	B	0,50	Implementasi SPBE mampu mendorong pelaksanaan manajemen internal serta pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	1. Portal Setjen Wantannas di www.wantannas.go.id 2. Portal PPIID di www.wantannas.go.id/ppiid 3. Portal E-Gov di egov.dkn.go.id 4. Portal LPSE di www.lipse.wantannas.go.id	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	B	0,50	Implementasi SPBE mampu mendorong pelaksanaan manajemen internal serta pelaksanaan pelayanan internal yang lebih cepat dan efisien	SIDIK, SAKTI, KRISNA, SRIKANDI, SIMDOKJI, SIMAK BMN	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			iii.	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,00			1,50			
				a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi organisasi telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh organisasi sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada organisasi sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	B	0,75	transformasi digital telah dilakukan Setjen Wantannas dengan mengubah dokumen saran kebijakan dari konvensional menjadi digital. Hal ini dikomodisi oleh aplikasi SIMDOKJI sebagai database yang memuat saran kebijakan Wantannas dari tahun ke tahun	aplikasi SIMMDOKJI	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi organisasi telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh organisasi sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada organisasi sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	B	0,75	Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan mampu membantu mempermudah aktivitas rutin yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Hal ini dapat diakomodasi oleh penganggaran dan keuangan (SAKTI), perencanaan (KRISNA), kepegawaian (SIDIK), dan pengelolaan BMN (SIMAK BMN)	aplikasi SAKTI, KRISNA, SIDIK, SIMAK BMN	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi organisasi telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh organisasi sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada organisasi sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	B	0,75	pada bidang pelayanan publik Setjen Wantannas telah berupaya melakukan transformasi digital sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi melalui portal Setjen Wantannas. Selain itu pada bidang pelayanan pengadaan telah digunakan SPSE yang telah berkolaborasi dengan layanan perencanaan (SIRUP), layanan E-katalog (E-purchasing), dan SIMWAS P3DN (peningkatan penggunaan produk dalam negeri)	aplikasi SIRUP, E-purchasing, SIMWAS P3DN	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	4,50			2,51			
			i.	Kinerja Individu	1,00			0,50			
				a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya	a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)	A/B/C	A	1,00	dalam hal ini berorientasi pada outcome level diatasnya	Dokumen SKP Pegawai	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Pencapaian kinerja individu telah menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan	a. Seluruh tunjangan kinerja/penghasilan yang diberikan telah didasarkan pada pencapaian kinerja individu b. Sebagian tunjangan kinerja/penghasilan yang diberikan telah didasarkan pada pencapaian kinerja individu c. Pemberian tunjangan kinerja/penghasilan belum didasarkan pada pencapaian kinerja individu	A/B/C	C	0,00	pemberian tunjangan kinerja masih berorientasi kehadiran pegawai	Sudah ada rencana terkait penggunaan aplikasi e-kinerja sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja dan sedang dalam proses integrasi	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			ii.	Evaluasi Jabatan	0,50			0,50			
				- Hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi sudah disampaikan ke menteri/pejabat berwenang	Evaluasi jabatan pimpinan tinggi dilaksanakan pada jabatan pimpinan tinggi pratama ke atas yg sudah menjabat diatas 5 th di posisi yg sama Persentase diperoleh dari Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama keatas sudah menjabat lebih dari 5 th yang sudah dirotasi dibagi dengan Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama keatas yang sudah menjabat lebih dari 5 th	%	100,00%	1,00	sudah bersurat kepada MenPANRB dengan tembusan BKN	Daftar Personil dan Daftar nominatif pegawai	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama keatas		Jumlah	68,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

			- Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama keatas yang sudah menjabat lebih dari 5 th		Jumlah	0,00				https://bit.ly/3ay05j8	
			- Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama keatas sudah menjabat lebih dari 5 th yang sudah dirotasi		Jumlah	0,00				https://ortala.wantannas.go.id/sirebo https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
		iii.	Assesment Pegawai	0,50			0,50				
			- Hasil assesment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	a. Seluruh hasil assesment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil assesment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil assesment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C	A	1,00		hasil asesmen merupakan salah satu pertimbangan pimpinan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	1. Rekomendasi dalam sidang baperjakat (notulen baperjakat) 2. Rencana pengembangan kompetensi pegawai	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		iv.	Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,50			0,50				
			- Penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	%	100,00%	1,00		Jumlah pelanggaran disiplin dapat diminimalisasi dengan bantuan aplikasi SIDIK	Laporan monev kelompok kepegawalan dan hukum tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya		Jumlah	0,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Jumlah pelanggaran tahun ini		Jumlah	0,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman		Jumlah	0,00				https://ortala.wantannas.go.id/sirebo https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
		v.	Kebutuhan Pegawai	0,50			0,04				
			- Hasil perhitungan kebutuhan pegawai telah dijadikan dasar dalam pembuatan formasi dan penerimaan pegawai baru	Persentase diperoleh dari Jumlah formasi yang diusulkan dibagi dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis perhitungan kebutuhan pegawai	%	7,61%	0,08		usul pengisian kebutuhan pegawai berdasarkan analisis perhitungan kebutuhan pegawai di Setjen Wantannas telah mengikuti aturan dan petunjuk teknis dari KemPANRB melalui aplikasi e-formasi	Diusulkan melalui aplikasi e-formasi	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis perhitungan kebutuhan pegawai		Jumlah	368,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Jumlah formasi yang diusulkan		Jumlah	28,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
		vi.	Penyetaraan Jabatan	0,50			0,47				
			- Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dalam rangka penyederhanaan Birokrasi	Persentase Jabatan Administrasi yang dilakukan penyetaraan jabatan ke Jabatan Fungsional	%	94,59%	0,95		Setjen Wantannas mendapatkan apresiasi dari KemPANRB dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional	Kepesjian Nomor 160 Tahun 2020 tentang pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan di Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah Jabatan Administrasi		Jumlah	37,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Jumlah Jabatan Administrasi yang telah disetarakan		Jumlah	35,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
		vii.	Manajemen Talenta	1,00			0,00				
			a. Dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya digunakan untuk proses penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan	#REF!	A/B/C/D	D	0,00		belum tersusunnya pemetaan talenta di Setjen Wantannas	1. Persejjen Wantannas Nomor 86 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Pegawai 2. Dokumentasi Sosialisasi tentang manajemen talenta dengan Kempanrb	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Penerapan Manajemen Talenta dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	Persentase pejabat Pimpinan Tinggi yang ditetapkan melalui proses manajemen talenta	%	0,00%	0,00			https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi		Jumlah	68,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi yang ditetapkan pengisiannya melalui proses manajemen talenta		Jumlah	0,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
		6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75			3,28				
		i.	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1,00			0,78				
			- Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien						pada tahun 2021 dan 2022 program dan kegiatan Setjen Wantannas telah menggunakan rumusan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya:							https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Jumlah program		Jumlah	2,00			terdapat di dokumen rencana kerja dan anggaran	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Jumlah kegiatan		Jumlah	18,00			terdapat di dokumen rencana kerja 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:	Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau lebih	%	1,00	1,00			https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Jumlah program		Jumlah	2,00			terdapat di dokumen rencana kerja 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Jumlah kegiatan		Jumlah	18,00			terdapat di dokumen rencana kerja 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih	Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	%	55,56%	0,56			https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Jumlah Sasaran Kinerja		Jumlah	9,00			LAKIP 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih		Jumlah	5,00			LAKIP 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Persentase Anggaran yang berhasil difocusing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:	Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran Kinerja tercapai 100% atau lebih Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil difocusing dibagi dengan Jumlah Anggaran Total	%	Blm Dilisi	Blm Dilisi		Dokumen Revisi DIPA TA 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			- Jumlah Anggaran Total		Rupiah					https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	

				- Jumlah Anggaran yang berhasil difocusing			Rupiah		Blm Dilisi				https://bit.ly/3ay05i8
		ii.		Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja	1,00				1,00				https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran			A/B/C/D	A	1,00		penginapan pada aplikasi kinerja dari bappenas dan DJA berdasarkan capaian kinerja dari setiap unit kerja dan dijadikan bahan evaluasi kinerja dan anggaran pada periode berikutnya	1. aplikasi e-monev Bappenas 2. aplikasi SMART DJA 3. aplikasi SAKTI 4. surat hasil evaluasi kinerja anggaran	https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		iii.		Pemberian Reward and Punishment	1,00				1,00				https://bit.ly/3ay05i8
				Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi			A/B/C/D	A	1,00		pada tahun 2021 plagam penghargaan diberikan kepada Desinas atas pencapaian kinerja dan anggaran	1. Persejten Wantannas Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tata Cara Reward dan Punishment Atas Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Dokumentasi pemberian penghargaan capain kinerja terbaik unit di lingkungan Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		iv.		Kerangka Logis Kinerja	0,75				0,50				https://bit.ly/3ay05i8
				terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai			A/B/C/D	B	0,67		peta strategi Setjen Wantannas TA 2021 telah dijadikan dasar dalam penyusunan SKP	1. Persejten No 25 Tahun 2020 tentang IKU 2020 - 2024 2. Peta Strategis Setjen Wantannas 3. SKP masing - masing pegawai	https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		7							3,17				
		i.		Penyampalan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	0,75				0,75				https://bit.ly/3ay05i8
				Persentase penyampaian LHKPN			%	100,00%	1,00		Berdasarkan Cut Off data LHKPN per tanggal 30 Maret 2022, terdapat Total 53 orang wajib lapor Sudah Lapor: 53 orang	screenshot LHKPN	https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				Jumlah yang harus melaporkan			Jumlah	53,00					https://bit.ly/3ay05i8
				Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga			Jumlah	0,00					https://bit.ly/3ay05i8
				Eselon I/II			Jumlah	53,00					https://bit.ly/3ay05i8
				Lainnya			Jumlah	0,00					https://bit.ly/3ay05i8
				Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	53,00					https://bit.ly/3ay05i8
		ii.		Penyampalan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil	0,60				0,60				https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				Persentase penyampaian LHKASN			%	100,00%	1,00		Total 76 orang Sudah Lapor: 76 orang	Screenshot LHKASN	https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)			Jumlah	76,00					https://bit.ly/3ay05i8
				Jumlah Eselon III			Jumlah	0,00					https://bit.ly/3ay05i8
				Jumlah Eselon IV			Jumlah	1,00					https://bit.ly/3ay05i8
				Jumlah Fungsional dan Pelaksana			Jumlah	75,00					https://bit.ly/3ay05i8
				Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	76,00					https://bit.ly/3ay05i8
		iii.		Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama (SP)	0,60				0,60				https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang			A/B/C/D/E	A	1,00		Aktivitas utama organisasi dikendalikan mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas, pimpinan unit kerja eselon I/kepala OPD dan Menteri/Kepala Daerah telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanisme kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali	1. Persejten Wantannas Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020 2. Laporan Penerapan Manajemen Risiko Setjen Wantannas TA. 2021	https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		iv.		Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60				0,60				https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

				- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	%	100,00%	1,00	Setjen Wantannas telah menyediakan kanal pengaduan masyarakat namun belum terdapat laporan masuk terkait pengaduan masyarakat	https://bit.ly/3ay05j8
				- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti		Jumlah	0,00			https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses		Jumlah	0,00			https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti		Jumlah	0,00			https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				v. Pembangunan Zona Integritas (ZI)	0,60			0,24		https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Komitmen Pembangunan ZI (Akumulatif):	A. Banyak unit kerja yang diusulkan dan banyak unit kerja yang mendapat Predikat WBK/WBBM B. Sedikit unit kerja yang diusulkan, namun banyak unit kerja yang mendapat Predikat WBK/WBBM C. Banyak unit kerja yang diusulkan, namun sedikit unit kerja yang mendapat Predikat WBK/WBBM D. Sedikit unit kerja yang diusulkan dan lebih sedikit lagi unit kerja yang mendapat Predikat WBK/WBBM E. Sedikit unit kerja yang diusulkan dan tidak ada unit kerja yang mendapat Predikat WBK/WBBM F. Banyak unit kerja yang diusulkan, namun tidak ada unit kerja yang mendapat Predikat WBK/WBBM G. Zona Integritas baru dibangun dan belum ada unit kerja yang diusulkan H. Belum ada pembangunan Zona Integritas	A/B/C/D/E/F/G/H	E	0,40	Sedikit unit kerja yang diusulkan dan tidak ada unit kerja yang mendapat Predikat WBK/WBBM, unit yang diajukan, dokumen data dukung meliputi dokumen pengajuan ZI dan penilaian PMPZI Depotra Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8
				- Pemetaan Unit Kerja untuk membangun ZI:						https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah seluruh Unit Kerja yang ada		Jumlah		Blm Diisi		https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah Unit Kerja yang memiliki resiko integritas tinggi		Jumlah	4,00			https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas		Jumlah	4,00			https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- WBK dalam 1 tahun:				0,00%		https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah Unit Kerja yang telah Diusulkan		Jumlah	1,00			https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah Unit Kerja Mendapat Predikat WBK		Jumlah	0,00			https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- WBBM dalam 1 tahun:				0,00%		https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah Unit Kerja yang telah Diusulkan		Jumlah	0,00			https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				- Jumlah Unit Kerja Mendapat Predikat WBBM		Jumlah	0,00			https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				vi. Peran APIP	0,60			0,38		https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				a. APIP telah menjalankan fungsi konsultatif	a. APIP telah membentuk unit-unit percontohan yang unggul dalam pelaksanaan beberapa bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik seperti perencanaan, pencatatan yang baik, pelaksanaan reviu berjenjang yang, dll yang telah menghasilkan capaian kinerja unit kerja melebihi target kinerja dan APIP aktif melakukan replikasi atas unit kerja tersebut; b. APIP telah membentuk unit-unit percontohan yang unggul dalam pelaksanaan beberapa bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik seperti perencanaan, pencatatan yang baik, pelaksanaan reviu berjenjang yang, dll yang telah menghasilkan capaian kinerja unit kerja melebihi target kinerja; c. APIP telah membentuk unit-unit percontohan yang unggul dalam pelaksanaan beberapa bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik seperti perencanaan, pencatatan yang baik, pelaksanaan reviu berjenjang yang, dll untuk memastikan kinerja unit kerja tercapai d. APIP memberikan masukan atau rekomendasi sebatas hasil pemeriksaan, reviu dan evaluasi e. APIP belum menjalankan fungsi konsultatif	A/B/C/D/E	D	0,25	APIP masih sebatas memberikan masukan atau rekomendasi hasil audit, reviu dan evaluasi, belum mencakup pembentukan unit-unit percontohan yang unggul dalam pelaksanaan beberapa bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, dokumen data dukung meliputi: Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Evaluasi	https://bit.ly/3ay05j8
				b. APIP memberikan saran masukan terkait peningkatan kinerja unit kerja	a. APIP memberikan saran terkait perbaikan proses bisnis, mekanisme kerja, dll serta memberikan masukan terkait arah kebijakan strategis unit kerja di masa yang akan mendatang; b. APIP memberikan saran terkait perbaikan proses bisnis, mekanisme kerja, dll c. APIP memberikan saran masukan sebatas rekomendasi hasil pemeriksa, evaluasi, dan reviu d. APIP tidak memberikan saran dan masuka terhadap peningkatan kinerja	A/B/C/D	A	1,00	APIP memberikan saran terkait perbaikan proses bisnis, mekanisme kerja, dll serta memberikan masukan terkait arah kebijakan strategis unit kerja di masa yang akan mendatang melalui Laporan Hasil Audit Triwulan I, dan tindaklanjuti yang dilaksanakan oleh auditee yakni dengan merevisi proses bisnis menjadi Persejken Wantannas No. 02 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Setjen Wantannas	https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
8				PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75			2,50		
				i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50			2,50		

			a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Berliku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan			%	100,00%	1,00	telah dilakukan perbaikan atas pemeliharaan kualitas sarana dan prasarana peralatan sistem informasi tahun 2021	inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada Kualitas Sarana dan prasarana sistem informasi	https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			Jumlah Inovasi yang dibuat		Jumlah		18,00				https://bit.ly/3ay05i8
			Jumlah Inovasi yang berpengaruh terhadap perbaikan layanan		Jumlah		18,00				https://ortala.wantannas.go.id/sirebo https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Upaya dan/atau inovasi pada perjanjian/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Jalur lebih pendek/singkat 3. Berintegrasi dengan aplikasi - Jumlah perjanjian/pelayanan yang terdata/terdaftar	Persentase diperoleh dari Jumlah perjanjian/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perjanjian/pelayanan yang terdata/terdaftar	%		100,00%	1,00	1. Mempermudah jalur birokrasi naskah yang sudah diproses atau belum 2. otentikasi jumlah yang divaksinasi dapat terhubung secara langsung dengan website wantannas	1. Mempermudah untuk mengetahui surat yang sudah direpson di Setneg 2. Mempermudah kegiatan pelaksanaan vaksinasi nasional layanan PPIID, LPSE, Kaminfo, Penyerapan Aspirasi	https://ortala.wantannas.go.id/sirebo https://ortala.wantannas.go.id/sirebo https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah perjanjian/pelayanan yang telah dipermudah		Jumlah		4,00			layanan PPIID, LPSE, Kaminfo, Penyerapan Aspirasi	https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1,25				0,00			https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab		%		0,00%	0,00	Tidak ada pengaduan pelayanan	laporan pengaduan dan konsultasi tahun 2021 (tidak ada laporan pengaduan)	https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			Jumlah Pengaduan dan konsultasi yang masuk		Jumlah		0,00				https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			Jumlah Pengaduan dan konsultasi yang langsung direpson dan tertangani sesuai SOP		Jumlah		0,00				https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
TOTAL PENGUNGKIT								#DIV/0!			https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
B. HASIL				40,00				7,25			
			1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	10,00				0,00			
			i. Opini BPK	3,00	Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP/ WDP/ TWP/ TW		Blm Diisi			https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			ii. Nilai SAKIP	7,00	Diisi dengan nilai hasil evaluasi implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB dengan skala 0-100	Nilai		Blm Diisi			https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00				7,25			
			- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	10,00	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan dengan skala 0-100	Indeks	72,51	7,25	IKM 2021		https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN	10,00				0,00			
			- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	10,00	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Anti Korupsi dengan skala 0-100	Indeks		Blm Diisi	SPI EKSTERNAL		https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			4 KINERJA ORGANISASI	10,00				0,00			
			i. Capaian Kinerja	5,00	Capaian atas rencana aksi yang telah ditetapkan	%		Blm Diisi			https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			ii. Kinerja Lainnya	2,00	a. Memiliki penghargaan internasional yg terkait dengan Reformasi Birokrasi b. Memiliki penghargaan nasional yg terkait dengan Reformasi Birokrasi c. Belum memiliki penghargaan yg terkait dengan Reformasi Birokrasi	A/B/C		Blm Diisi			https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			iii. Survei Internal Organisasi	3,00	Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi dan Integritas Jabatan dengan skala 0-100	Indeks		Blm Diisi	SPI INTERNAL		https://bit.ly/3ay05i8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
TOTAL HASIL								7,25			